

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun untuk menjalankan pembangunan nasional diperlukan pembiayaan yang besar dan pelaksanaan pembangunan harus adil serta merata di seluruh tanah air. Pembangunan nasional berkaitan erat dengan pembangunan daerah, ketika pembangunan di setiap daerah berhasil maka pembangunan nasional yang diharapkan akan tercapai. Perlu adanya keselarasan perencanaan antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, serta harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan melalui prinsip otonomi daerah yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan dapat meningkatkan kemandirian daerah. Untuk dapat melaksanakan dan membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerahnya, setiap daerah diberikan sumber-sumber keuangan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat dilihat melalui keuangan daerahnya dengan memperhatikan besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh.

Pendapatan asli daerah diperoleh pemerintah daerah dari hasil pungutan dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 33 tahun 2004). Salah satu sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yaitu pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah adalah pendapatan asli daerah, hal ini berarti semakin besar pendapatan asli daerah maka daerah tersebut semakin

mandiri. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Beberapa indikator makro dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan dan kinerja perekonomian suatu daerah. Indikator makro tersebut yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi pada wilayah atau daerah tertentu serta dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Peningkatan produksi barang dan jasa yang di ukur melalui PDRB berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga sebagai indikator untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam periode tertentu. Dengan menggunakan PDRB dapat dilihat bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya pembangunan yang ada pada daerahnya, sehingga besarnya PDRB pada setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi dan faktor produksi yang dimiliki masing-masing daerah. Ketika PDRB mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah akan meningkat karena menjadi tolok ukur pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Jumlah penduduk sangat mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah ketika jumlah penduduk meningkat maka semakin banyak pula masyarakat yang berbelanja, dengan banyaknya barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat akan menyebabkan perkembangan usaha-usaha di daerah tersebut semakin baik, dimana ketika usaha semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah semakin tinggi. Selain itu penduduk sebagai input yang potensial, yang mana digunakan dalam faktor produksi untuk meningkatkan hasil produksi perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran terbesar di dalam perpajakan, lebih khususnya pajak daerah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah yang diterapkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu komponen dari pajak daerah yaitu pajak hotel yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan untuk sementara waktu. Pajak hotel memberikan

kontribusi nyata terhadap nilai pajak daerah. Pajak hotel merupakan pajak atas suatu pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah).

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu PDRB, jumlah penduduk, dan pajak hotel apabila mengalami kenaikan akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut salah satu fakta yang diperoleh melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tasikmalaya dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya fenomena sebagai berikut:

Tabel 1. Fenomena Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya

Tahun	2014	2015
Pendapatan Asli Daerah	Rp.253.450.505.788,21	Rp.242.979.820.517,50
PDRB	Rp.13.623.772,90	Rp.15.234.112,0
Jumlah Penduduk	654.794	657.477
Pajak Hotel	Rp.2.236.970.016	Rp.2.294.530.818

Sumber : LKPD Kota Tasikmalaya dan BPS Kota Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar RP.1.047.068.520 dari tahun 2014, ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah belum optimal meskipun beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan.

Dalam variabel produk domestik regional bruto diketahui Kota Tasikmalaya memiliki PDRB sebesar Rp.15.234.112 pada tahun 2015 ini lebih besar dibanding dengan tahun 2014 sebesar Rp.13.623.772,9. Namun pendapatan asli daerah tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014 seharusnya ketika PDRB mengalami peningkatan pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan karena PDRB dapat digunakan sebagai tolok ukur pendapatan masyarakat dengan pendapatan asli daerah, ketika pendapatan seseorang semakin tinggi maka akan semakin tinggi juga seseorang akan membayar pajak yang ditetapkan pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB perkaptal riil suatu daerah maka semakin besar kemampuan masyarakat daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Dalam variabel jumlah penduduk diketahui Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk sebesar 657.477 pada tahun 2015, jumlah ini lebih besar dibanding dengan tahun 2014 sebesar 654.794. Namun pendapatan asli daerah tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014, seharusnya ketika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan karena dengan banyaknya jumlah penduduk pendapatan yang ditarik akan meningkat dalam artian jumlah konsumsi meningkat sehingga usaha-usaha yang ada pada daerah sekitar akan semakin maju, ketika usaha semakin besar pajak yang ditarik akan semakin tinggi.

Dalam variabel pajak hotel diketahui Kota Tasikmalaya memiliki Pajak Hotel sebesar Rp.2.294.530.818 pada tahun 2015 ini lebih besar dibanding dengan tahun 2014 sebesar Rp.2.236.970.016. Namun pendapatan asli daerah tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014, seharusnya ketika pajak hotel mengalami peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkat karena pajak hotel memberikan kontribusi nyata terhadap nilai pajak daerah dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pajak hotel akan meningkatkan pajak daerah yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Berkembangnya industri pariwisata dikota Tasikmalaya mampu menggerakkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata, seperti sektor hotel.

Penelitian ini selain berdasarkan fenomena yang terjadi, dilatarbelakangi oleh *gap research* yang dilakukan peneliti terdahulu yang masih ada perbedaan hasil penelitian seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Muchtolifah (2010), Liliana, *et al* (2011), Batik, Karlina (2013), Jaya & Widanta (2014), Marliyani & Arka (2014), dan Mayza, dkk (2015) menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf, dkk (2015) menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian dari Batik, Karlina (2013) dan Mayza, dkk (2015) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Liliana, *et al* (2011), Jaya &

Widanta (2014), Asmuruf, dkk (2015), dan Murib, dkk (2016) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian dari Rustanto, dkk (2013), Suartini & Utama (2013), Widyaningsih & Budhi (2014), Prayanti, dkk (2014), dan Wulandari & Iryanie (2016) menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sebaliknya penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitasari, dkk (2015), dimana menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian diatas masih ada perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel yang digunakan adalah PDRB, Jumlah Penduduk, dan Pajak Hotel serta menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan sampel yang digunakan adalah di provinsi Jawa tahun 2014-2016.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
- b. Apakah Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
- c. Apakah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah.
- b. Untuk membuktikan pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah.
- c. Untuk membuktikan pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

- a. Bagi Teoritis

Memberikan bukti untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam kajian berikutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan pembaca dikalangan akademis maupun non akademis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

- b. Bagi Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar penerimaan dimasa yang akan datang dapat di optimalkan.

- 2) Bagi Investor dan masyarakat

Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk mengetahui gambaran keadaan keuangan pemerintah daerah.